




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2021**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2018-2023

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa sesuai hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, maka terdapat perubahan dalam penetapan target-target Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 53); 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 53) yang telah diubah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 1 Februari 2021

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR.


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 1 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 01

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : II TAHUN 2021

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2018-2023**

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil							
	I.1 Mewujudkan Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera	Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah					Laju Pertumbuhan PDRB ADHK
			I.1.1 Tumbuhnya Ekonomi Daerah secara Stabil dan Berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB (%)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Tenaga Kerja; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistik	$\frac{PDRB(t+1) - PDRB(t)}{PDRB(t)} \times 100\%$ <p>Dimana: t+1 = tahun pengamatan PDRB; t = tahun pengamatan PDRB sebelumnya</p>
				Inflasi (%)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah; Tenaga Kerja; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistik	$[(1 + \Delta Inf_1)(1 + \Delta Inf_2) \dots (1 + \Delta Inf_t)]^A - 1$ <p>dimana: ΔInf : Perubahan Inflasi dari Nilai tahun sebelumnya t : adalah periode pengamatan perubahan nilai inflasi.</p> <p>Sedangkan ΔInf dihitung dengan rumus sebagai berikut: Dimana:</p> $\Delta Inf = \frac{Inf_{(n+1)} - Inf_{(n)}}{Inf_{(n)}} \times 100\%$ <p>Inf_n = Nilai Inflasi pada tahun n Inf_(n+1) = Nilai Inflasi pada tahun berikutnya n = Tahun</p>

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				PDRB per Kapita (Rp. Juta)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah; Tenaga Kerja ; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistik	PDRB/ Penduduk Pertengahan tahun
			I.1.2 Berkurangnya Kemiskinan	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan (%)		Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Perikanan dan kelautan; Energi dan Sumber Daya Mineral; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Perindustrian; Perdagangan; Penanaman Modal; Lingkungan Hidup; statistik.	(100 – angka kemiskinan)
				Indeks Keparahan Kemiskinan (Poin)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Perencanaan Pembangunan; sosial; Tenaga Kerja; Transmigrasi penanaman modal; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah usaha kecil dan menengah; kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Komunikasi dan Informatika	Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.
				Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poin)		Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Perencanaan Pembangunan; sosial; Tenaga Kerja; Transmigrasi penanaman modal; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah usaha kecil dan menengah; kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perdagangan; Perindustrian; Komunikasi dan Informatika	Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran pesuduk dari garis kemiskinan.

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			I.1.3 Terciptanya Lapangan Kerja dan Meningkatnya Produktivitas Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan: Tenaga Kerja; Transmigrasi Pertanian Pangan; Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Perindustrian; Perdagangan; Lingkungan Hidup	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/ Jumlah penduduk angkatan kerja x100%
				Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan: Pertanian; Pangan; Tenaga Kerja; Transmigrasi Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Perindustrian; Perdagangan; Lingkungan Hidup; statistik	Angkatan kerja 15 tahun ke atas/ Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x100%
				Produktivitas Total Daerah (Rp. Juta)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pertanian; Pangan; Tenaga Kerja; Transmigrasi Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Perindustrian dan Perdagangan; Lingkungan Hidup; statistik.	Nilai Tambah Sektor ke-I/ Jumlah Angkatan Kerja
				Cakupan Pekerja Tanpa Upah dibandingkan Penduduk yang bekerja (%)	BPS	Perangkat yang membidangi Urusan : Pertanian; Pangan; Tenaga Kerja; Transmigrasi Kepemudaan dan Olahraga; Perdagangan; Perindustrian; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Sosial; Perindustrian; Perdagangan; Lingkungan Hidup;	jumlah pekerja tak berupah/ jumlah penduduk yang bekerja X 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	I.2 Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri	Kemandirian Fiskal Daerah					
			I.2.1 Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	Bapenda; Badan Keuangan Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Penanaman Modal; Perdagangan; Perindustrian; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Statistik;	PAD / Total Pendapatan Daerah x 100%
			I.2.2 Menguatnya peranan NTT dalam Perdagangan Regional	Rasio Ekspor Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Penanaman Modal; Kelautan dan Perikanan; Perindustrian; perdagangan; Pariwisata; Pertanian; Lingkungan hidup; Energi dan Sumberdaya Mineral; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.	Jumlah ekspor dan impor barang dan jasa / PDB
			I.2.3 Menurunnya Ketergantungan Ekonomi Masyarakat	Rasio Ketergantungan (%)	BPS/ BI	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan : Sosial; Pemberdayaan masyarakat dan desa; Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; Perindustrian; Perdagangan; Pertanian; Pangan; Kelautan dan Perikanan; statistik.	Penduduk usia <15 th + usia >64 / Penduduk usia 15-64 x100
			I.2.4 Terwujudnya Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Skor	BPS/ Badan Ketahanan Pangan	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan : Pangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Kehutanan; Kesehatan; Pendidikan; Sosial; Ketentraman Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.	PPH = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok Pangan
	I.3 Mewujudkan NTT yang berkeadilan Sosial	Indeks Gini			BPS/BI		$G = 1 - \sum_{i=1}^n P_i(Q_i + Q_{i-1})$ <p>dimana: P_i = Persentase Rumah tangga atau penduduk pada kelas ke -i Q_i : Persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke -i</p> <p>Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, Jika G < 0,3 = ketimpangan rendah 0,3 ≤ G ≤ 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p>

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			I.3.1 Berkurangnya Ketimpangan antar Kelompok Masyarakat dan antar wilayah	Indeks Gini (Poin)	BPS/BI	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Sosial; Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat; Pendidikan; Kesehatan; Koperasi, Usaha Keil dan Menengah; Tenaga Kerja; Transmigrasi	sda
			I.3.2 Terjaminnya keadilan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender (Poin)	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial;	<p>Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan dalam UNDP tahun 2010:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimensi : Umur sehat dan Panjang, Indikator : Angka Harapan Hidup saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan 2. Dimensi Pengetahuan, Indikator : Harapan lama sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan, Rata-rata lama sekolah (MYS), laki-laki dan perempuan 3. Dimensi : kehidupan yang layak, indikator : Perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan. <p>Karena rumus IPG mirip dengan Rumus penghitungan IPM, maka IPG dihitung dengan membandingkan IPM laki-laki dengan IPM perempuan $IPG = \frac{IPM \text{ Perempuan}}{IPM \text{ laki-laki}}$</p>

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Pemberdayaan Gender (Poin)	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial;	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperakn dalam kehidupan ekonomi dan politik; 2. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan; 3. Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung. a. Dimensi Keterwakilan di Parlemen, Indikator : Proporsi keterwakilan laki-laki dan perempuan di parlemen b. Dimensi Pengambilan Keputusan, Indikator : Proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan c. Dimensi distribusi pendapatan, indikator : upah buruh non pertanian, laki-laki dan perempuan
				Persentase Kekerasan terhadap Anak yang Tertangani (%)	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak/ Kepolisian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; Pendidikan; Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; Komunikasi dan Informatika; Kebudayaan;	Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani / jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan x 100%
				Persentase Kekerasan terhadap Perempuan yang Tertangani (%)	BPS/ Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak/ Kepolisian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak; Sosial;	Kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani / jumlah seluruh kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan x 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI II: Membangun NTT Sebagai Salah Satu Gerbang dan Pusat Pengembangan Pariwisata Nasional (Ring Of Beauty NTT)							
	II.1 Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	Pertumbuhan PDRB pada Sektor Sekunder dan Tersier					
			II.1.1 Pengembangan Pariwisata NTT melalui Pemenuhan unsur 5A Pariwisata (<i>Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness</i>) dengan Pola Pendekatan Kawasan	Share Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pariwisata; Perdagangan; Perindustrian; Perhubungan; Penanaman modal; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kebudayaan; Pekerjaan Umum dan Penataan ruang; Pertanian; Kelautan dan perikanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; Perindustrian; Perdagangan; Kesehatan; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kepemudaan dan olahraga;	Jumlah Kontribusi PDRB dari lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Jumlah PDRB x100%
				Share Lapangan Usaha jasa lainnya terhadap PDRB (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pariwisata; Perdagangan; Perindustrian; Perhubungan; Penanaman modal; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kebudayaan	Jumlah Kontribusi PDRB lapangan usaha jasa lainnya / Jumlah PDRB x100%
				Share Lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran terhadap PDRB (%)	BPS	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pariwisata; Perdagangan; Perindustrian; Perhubungan; Penanaman modal; Komunikasi dan Informatika; Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Kebudayaan	Jumlah Kontribusi PDRB dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran/ Jumlah PDRB x100%
			II.1.2 Meningkatnya Sumbangan Pariwisata terhadap Perekonomian Daerah	Pertumbuhan UKM dan IKM di Daerah Wisata (%)	BPS / Dinas Perindustrian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Penanaman Modal; Tenaga Kerja.	Jumlah Industri RT di daerah wisata Tahun n- Jumlah Industri RT di daerah wisata Tahun (n-1)**/Jumlah Industri RT di daerah wisata s/d Tahun n x100%
				Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Rata-rata lama hari yang dihabiskan wisatawan dalam satu kali kunjungan
				Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pariwisata; Perhubungan; penanaman modal; perindustrian; perdagangan	Total jumlah kunjungan wisatawan ke Nusa Tenggara Timur dalam satu tahun

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI III : Meningkatkan Ketersediaan Dan Kualitas Infrastruktur Untuk Mempercepat Pembangunan							
	III.1 Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah dan Presentase Infrastruktur ke PUDan Perhubungan dalam Kondisi Baik					
			III.1.1 Terwujudnya konektivitas antar wilayah di dalam daerah dan keluar daerah	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam dalam Kondisi Mantap (%)	Dinas PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup; Energi dan Sumberdaya mineral; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Σ panjang Jalan Provinsi kondisi baik dan sedang / Σ Panjang jalan provinsi x 100%
				Dwelling Time Pelabuhan (hari)	Dinas Perhubungan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan; Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Energi dan Sumberdaya mineral; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	Rata-rata lama hari yang dibutuhkan merupakan waktu yang dihitung mulai dari suatu peti kemas (kontainer) dibongkar muat dan diangkat (unloading) dari kapal sampai petikemas tersebut meninggalkan terminal pelabuhan melalui pintu utama
				Cakupan Pelayanan Angkutan Darat (%)	Dinas Perhubungan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perhubungan	cakupan pelayanan dibandingkan dengan seluruh rute yang ada
			III.1.2 Tersedianya infrastruktur Pengairan yang mendukung peningkatan produksi Pertanian	Terbangunannya Jaringan Irigasi bagi Petani (%)	Dinas PUPR / Dinas Pertanian	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Pertanian; Pangan; lingkungan hidup dan kehutanan;	panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik/ total panjang jaringan irigasix 100%
	III.2 Meningkatnya ketersediaan infrastruktur pelayanan dasar						
			III.2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, air minum dan sanitasi layak	Penambahan Rumah Layak Huni (unit)	Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Transmigrasi; Pekerjaan umum dan Penataan ruang	Jumlah KK berpenghasilan rendah yang memiliki rumah/ jumlah total KK berpenghasilan rendah X 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI IV : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
	IV.1 Mewujudkan Kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia					
			IV.1.1 Mewujudkan kualitas SDM NTT yang tinggi dan berdaya saing	Angka Melek Huruf (%)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kearsipan; Statistik; Kebudayaan; Sosial.	Jumlah penduduk yang dapat membaca / jumlah seluruh penduduk X 100%
				Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Pendidikan; Perpustakaan; Kebudayaan; Sosial.	Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang
			IV.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat NTT	Usia Harapan Hidup (tahun)	Dinas Kesehatan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Kesehatan; Sosial	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur
				Prevelensi Stunting (%)	Dinas Kesehatan; Dinas Sosial	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Kesehatan; Pendidikan, Sosial; Pangan; Pertanian; Kelautan dan Perikanan; Pekerjaan Umum dan penataan ruang; Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Statistik;	Jumlah Kasus stunting
			IV.1.3 Meningkatnya kualitas pemuda dan prestasi keolahragaan	Cakupan Pembinaan Pemuda dan Keolahragaan (%)	Dinas Pemuda dan Olahraga	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Kepemudaan dan Olahraga; Tenaga Kerja; Transmigrasi Sosial; Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.	Jumlah asosiasi kepemudaan yang dibina/ jumlah seluruh asosiasi pemuda X 100%

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Rumah Tangga menurut Air Layak (%)	Dinas Sosial, Dinas PUPR,	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Transmigrasi; Kehutanan; Energi dan Sumberdaya Mineral; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;	Jumlah RT yang mendapat layanan air bersih / jumlah Seluruh RT X 100%
				Persentase Rumah tangga menurut Sanitasi Layak (%)	Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan Hidup; Transmigrasi; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;	jumlah rumah tangga dengan sanitasi layak / Jumlah seluruh rumah tangga X 100%
			III.2.2 Tersedianya Sumber daya kelistrikan yang memadai dan murah untuk meningkatkan rasio elektrifikasi Rumah Tangga dan Mendukung Kebutuhan Ekonomi	Rasio Elektrifikasi (%)	Dinas ESDM	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Energi dan Sumberdaya mineral; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perhubungan; Lingkungan hidup; Kehutanan; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;	Jumlah RT yang memiliki akses elektrifikasi / jumlah seluruh RT X 100%
	III.3 Menjamin terpenuhinya dimensi keberlanjutan (sustainability) lingkungan hidup dalam pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup					
			III.3.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perhubungan	Skor IKLH merupakan indeks komposit yang terdiri dari 1. Kualitas air sungai 2. Kualitas udara 3. Tutupan lahan
			III.3.2 Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Emisi Gas Rumah Kaca (Ton CO ₂ e)	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup;	Jumlah emisi gas rumah kaca (CO ₂) yang dihasilkan dalam satu tahun.
			III.3.3 Terwujudnya Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang	Kesesuaian Fungsi, Struktur dan Pola Ruang (%)	Bappelitbangda, Dinas PUPR	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : Lingkungan Hidup; Pekerjaan umum dan Penataan ruang;; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Lingkungan hidup; kehutanan; penanggulangan bencana	Jumlah regulasi tata ruang yang diundangkan / jumlah kebutuhan regulasi mengenai tata ruang
			III.3.4 Terwujudnya pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kawasan Perbatasan Negara	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)	Dinas PUPR	Dinas PUPR	Kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang (%)
			III.3.5 Meningkatnya ketangguhan bencana daerah dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim	Indeks Resiko Bencana (Poin)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan : ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, Sosial;	Skor Indeks Resiko bencana

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN															
1	2	3	4	5	6	7	8															
MISI V : Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik																						
	V.1 Mewujudkan Birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel dan memberikan pelayanan publik yang baik	Indeks Kepuasan Masyarakat																				
			V.1.1 Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah (Poin)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap upaya Reformasi Birokrasi															
				Opini BPK (Opini)	BPPKAD	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	penilaian opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Pemerintah															
				Nilai Akuntabilitas Kinerja (Predikat)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap SAKIP															
				Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)(Skor)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	Penilaian Kementerian Penggunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap Sistem pemerintahan berbasis Elektronik															
				Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (%)	Dinas Informasi dan Komunikasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT																
				Indeks Kepuasan Pelayanan Publik (Poin)	Biro Organisasi	Seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT	<p> $IPK = \frac{\text{Jumlah Nilai Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah User}} \times 100$ </p> <p> Dimana: Indeks Kepuasan Pelayanan Publik = $\frac{\text{Jumlah Nilai Pelayanan Publik}}{\text{Jumlah User}} \times 100$ </p> <p> Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IPK yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikategorikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut: IPK Unit Pelaksana x 25 </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai IPK</th> <th>Kategori</th> <th>Warna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 - 75</td> <td>A</td> <td>Hijau</td> </tr> <tr> <td>75 - 50</td> <td>B</td> <td>Kuning</td> </tr> <tr> <td>50 - 25</td> <td>C</td> <td>Merah</td> </tr> <tr> <td>25 - 0</td> <td>D</td> <td>Biru</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai IPK	Kategori	Warna	100 - 75	A	Hijau	75 - 50	B	Kuning	50 - 25	C	Merah	25 - 0	D	Biru
Nilai IPK	Kategori	Warna																				
100 - 75	A	Hijau																				
75 - 50	B	Kuning																				
50 - 25	C	Merah																				
25 - 0	D	Biru																				

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	KPUD	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik	DI adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya di ukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu : Kebebasan Sipil (Civil Liberty); Hak-Hak Politik (Political Right); dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT